

Kepemimpinan Humanis di Tengah Disrupsi Teknologi Pendidikan

Ainul Yaqin¹, Eprilia Rimadani², Robi'atul Adawiyah³, Renyta Susiari⁴, Ahmad Thohirin⁵

Mahasiswa Universitas Gresik¹²³⁴

Email: ainul.yaqin187@gmail.com¹

Abstrak

Disrupsi teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, baik pada metode pembelajaran, pola interaksi, maupun arah kebijakan. Di satu sisi, teknologi membuka peluang melalui akses informasi yang luas, efisiensi, dan fleksibilitas; namun di sisi lain berpotensi menurunkan nilai kemanusiaan, seperti berkurangnya interaksi, munculnya kesenjangan digital, dan dominasi orientasi teknokratis. Kajian ini bertujuan menelaah urgensi kepemimpinan humanis dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis telaah literatur, kajian ini mengkaji konsep kepemimpinan humanis yang menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, empati, relasi interpersonal yang sehat, serta pembentukan karakter peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan humanis memiliki relevansi strategis di era disrupsi teknologi karena mampu menyeimbangkan inovasi digital dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, kepemimpinan humanis menjadi fondasi penting untuk memastikan transformasi digital dalam pendidikan tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga menjadi sarana pemerdekaan dan pemanusiaan peserta didik.

Kata kunci: kepemimpinan humanis, disrupsi teknologi, pendidikan, humanisasi, transformasi digital.

Abstract

Technological disruption has brought significant changes to education, including learning methods, patterns of interaction, and policy directions. On the one hand, technology offers opportunities through broad access to information, efficiency, and flexibility; on the other hand, it has the potential to undermine human values, such as reduced social interaction, the emergence of digital inequality, and the dominance of technocratic orientation. This study aims to examine the urgency of humanistic leadership in addressing these challenges. Using a qualitative method based on literature review, this study explores the concept of humanistic leadership, which emphasizes respect for human dignity, empathy, healthy interpersonal relationships, and the character development of learners. The findings show that humanistic leadership holds strategic relevance in the era of technological disruption, as it balances digital innovation with human values. In conclusion, humanistic leadership becomes a crucial foundation to ensure that digital transformation in education is not merely technology-oriented, but also serves as a means of liberation and humanization for students.

Keywords: humanistic leadership, technological disruption, education, humanization, digital transformation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan tersebut sering disebut sebagai disrupsi teknologi, yakni transformasi mendasar yang menggeser pola lama menuju sistem baru berbasis inovasi digital (Christensen, 2016)¹. Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh fenomena ini. Jika sebelumnya proses pembelajaran lebih banyak mengandalkan metode konvensional tatap muka, maka kini pendidikan bergerak menuju format yang lebih fleksibel melalui pembelajaran daring, learning management system (LMS), pemanfaatan big data, hingga penerapan kecerdasan buatan (Selwyn, 2019)².

Transformasi digital tersebut membuka peluang yang sangat luas. Akses informasi menjadi semakin mudah, sumber belajar semakin beragam, dan efisiensi dalam proses pembelajaran meningkat signifikan. Peserta didik dapat belajar tanpa

¹ Clayton M. Christensen, *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail* (Boston: Harvard Business Review Press, 2016), hlm. 12

² Neil Selwyn, *Education and Technology: Key Issues and Debates* (London: Bloomsbury Publishing, 2019), hlm. 45.

batas ruang dan waktu, sementara guru memperoleh beragam media untuk memperkaya strategi pembelajaran. Lebih jauh, teknologi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran yang dapat menyesuaikan kebutuhan serta kecepatan belajar setiap individu. Dengan demikian, teknologi berpotensi memperluas jangkauan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar.

Namun, seiring dengan peluang yang ditawarkan, disrupsi teknologi juga membawa konsekuensi serius. Interaksi interpersonal antara guru dan murid cenderung menurun karena komunikasi lebih banyak dimediasi oleh layar digital. Kesenjangan digital semakin nyata, terutama antara peserta didik yang memiliki akses teknologi dengan mereka yang tidak. Selain itu, terdapat risiko terjadinya pergeseran orientasi pendidikan menjadi semata-mata teknokratis, yang menekankan capaian kognitif dan penguasaan teknis, sementara aspek afektif dan nilai-nilai kemanusiaan terabaikan (Zhao, 2020)³. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya dehumanisasi pendidikan, yakni situasi di mana manusia ditempatkan sebagai objek teknologi, bukan sebagai subjek utama dalam proses belajar.

Dalam konteks inilah, peran kepemimpinan pendidikan menjadi sangat strategis. Pemimpin pendidikan tidak hanya dituntut untuk mampu mengadopsi dan mengelola perkembangan teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa transformasi digital tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep kepemimpinan humanis hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Kepemimpinan humanis menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, mengedepankan empati, membangun komunikasi dialogis, serta mendorong pembentukan karakter peserta didik (Noddings, 2013)⁴. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak diperlakukan semata-mata sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai sarana yang dapat memperkuat tujuan utama pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Konteks Indonesia semakin menegaskan pentingnya kajian ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan jelas merumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan peserta didik agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya, pendidikan di Indonesia tidak boleh berhenti pada pencapaian aspek pengetahuan dan keterampilan semata, melainkan juga harus berorientasi pada pembentukan karakter dan nilai-nilai Pancasila. Jika transformasi digital tidak diimbangi dengan kepemimpinan yang berlandaskan nilai humanis, maka tujuan ideal pendidikan nasional berisiko mengalami distorsi⁵.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang cukup jelas antara peluang besar yang ditawarkan teknologi dengan potensi masalah yang ditimbulkannya dalam bentuk dehumanisasi pendidikan. Hal ini menuntut adanya strategi kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kajian tentang Kepemimpinan Humanis di Tengah Disrupsi Teknologi Pendidikan menjadi penting untuk dilakukan, agar pendidikan tetap berfungsi sebagai sarana pemerdekaan, pemanusiaan, dan pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berakhlak, dan memiliki kepedulian sosial.

Fenomena disrupsi teknologi dalam pendidikan telah membawa perubahan signifikan, namun sekaligus menimbulkan sejumlah problem akademik yang perlu dikaji secara serius. Masalah-masalah ini muncul karena adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi yang begitu cepat dengan kapasitas pendidikan dalam mengelolanya secara bijak. Beberapa problem akademik yang menonjol di antaranya:

1. Ketimpangan kompetensi digital pendidik dan peserta didik.

Tidak semua pendidik memiliki literasi digital yang memadai, sementara peserta didik juga mengalami perbedaan kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Hal ini menimbulkan ketidakmerataan kualitas pembelajaran (Selwyn, 2019)⁶.

2. Menurunnya kualitas interaksi interpersonal.

³ Yong Zhao, *An Education Crisis Is a Terrible Thing to Waste: How Radical Changes Can Spark Student Success* (New York: Teachers College Press, 2020), hlm. 88.

⁴ Nel Noddings, *Education and Democracy in the 21st Century* (New York: Teachers College Press, 2013), hlm. 56.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301

⁶ Neil Selwyn, *Education and Technology: Key Issues and Debates* (London: Bloomsbury Publishing, 2019), hlm. 102

Pergeseran pembelajaran dari tatap muka ke ruang digital mengurangi intensitas komunikasi langsung antara guru dan siswa. Padahal, interaksi personal merupakan media penting dalam pembentukan karakter, nilai, dan relasi emosional (Zhao, 2020)⁷.

3. Orientasi teknokratis dalam pendidikan.

Pemanfaatan teknologi yang berlebihan berisiko menggeser fokus pendidikan menjadi sekadar pencapaian kognitif dan teknis, sehingga mengabaikan fungsi humanisasi sebagai ruh utama pendidikan (Freire, 2005)⁸.

4. Kesenjangan digital.

Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital dan jaringan internet. Hal ini memunculkan ketidakadilan akademik, terutama bagi siswa di daerah terpencil atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi (Tilaar, 2002)⁹.

Problem akademik tersebut menunjukkan bahwa teknologi, meskipun membawa inovasi, berpotensi menimbulkan dehumanisasi dalam pendidikan jika tidak diimbangi dengan pendekatan kepemimpinan yang tepat. Oleh karena itu, kepemimpinan humanis menjadi kunci untuk menjaga agar pendidikan tetap berorientasi pada pemerdekaan dan pemanusiaan, sekaligus mampu mengelola transformasi digital secara bermakna.

Kajian mengenai kepemimpinan dalam dunia pendidikan, khususnya yang berorientasi pada nilai-nilai humanis, telah banyak dilakukan baik dalam konteks nasional maupun internasional. Penelitian-penelitian ini menjadi pijakan penting dalam memahami urgensi kepemimpinan humanis di era disrupsi teknologi.

Noddings (2013)¹⁰ melalui teorinya tentang *ethics of care* menegaskan bahwa kepemimpinan dalam pendidikan harus berorientasi pada empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Menurutnya, hubungan interpersonal yang sehat antara guru, peserta didik, dan pemimpin pendidikan merupakan fondasi bagi terbentuknya suasana belajar yang bermakna. Dalam konteks Indonesia, penelitian Mutohar (2019)¹¹ mengenai kepemimpinan kepala sekolah di era digital menemukan bahwa kepemimpinan yang mengedepankan nilai humanis mampu meminimalkan dampak negatif teknologi, khususnya dalam menjaga interaksi guru-siswa dan mengurangi kesenjangan digital. Senada dengan itu, Arifin (2021)¹² menunjukkan bahwa kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan humanis di sekolah berbasis digital berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa sekaligus memperkuat karakter mereka. Sementara itu, pada tingkat global, Senge (2006)¹³ melalui kerangka *learning organization* menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran yang bermakna, di mana nilai kemanusiaan tetap menjadi pusat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan humanis tidak hanya relevan di level lokal, tetapi juga menjadi isu global yang mendesak dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Kajian mengenai kepemimpinan dalam dunia pendidikan, khususnya yang berorientasi pada nilai-nilai humanis, telah banyak dilakukan baik dalam konteks nasional maupun internasional. Penelitian-penelitian ini menjadi pijakan penting dalam memahami urgensi kepemimpinan humanis di era disrupsi teknologi.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan urgensi kepemimpinan humanis di tengah fenomena disrupsi teknologi dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan transformasi besar yang tidak hanya memengaruhi metode pembelajaran dan pola interaksi, tetapi juga memunculkan problematika mendasar yang berpotensi menggeser esensi pendidikan sebagai proses pemanusiaan. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk

⁷ Yong Zhao, *An Education Crisis Is a Terrible Thing to Waste: How Radical Changes Can Spark Student Success* (New York: Teachers College Press, 2020), hlm. 134.

⁸ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 2005), hlm. 72.

⁹ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.

¹⁰ Nel Noddings, *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global* (Berkeley: University of California Press, 2013), hlm. 89.

¹¹ S. Mutohar, *Kepemimpinan Kepala Sekolah di Era Digital* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 67.

¹² Zainal Arifin, *Kepemimpinan Humanis di Sekolah Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 105.

¹³ Peter M. Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization* (New York: Doubleday, 2006), hlm. 129.

menegaskan peran kepemimpinan humanis sebagai paradigma yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Secara spesifik penelitian ini mengkaji tentang:

1. Mengidentifikasi problem akademik akibat disrupsi teknologi dalam pendidikan.
Penelitian ini menelaah berbagai problematika yang muncul, antara lain ketimpangan kompetensi digital antara guru dan siswa, berkurangnya kualitas interaksi interpersonal yang berperan penting dalam pembentukan karakter, kesenjangan digital yang menghambat keadilan pendidikan, serta kecenderungan dominasi orientasi teknokratis yang dapat mereduksi makna pendidikan.
2. Menguraikan konsep kepemimpinan humanis serta relevansinya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
Kajian ini berupaya memperjelas fondasi teoretis kepemimpinan humanis, yang menekankan empati, kepedulian, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penguatan nilai-nilai moral. Relevansi konsep ini ditinjau dalam konteks pendidikan kontemporer, agar teknologi tetap ditempatkan sebagai sarana, bukan tujuan utama dalam proses pembelajaran.
3. Menganalisis tantangan dan peluang penerapan kepemimpinan humanis di era digital.
Penelitian ini mengeksplorasi dinamika yang dihadapi dalam penerapan kepemimpinan humanis, baik hambatan seperti keterbatasan literasi digital, resistensi terhadap perubahan, maupun peluang berupa diversifikasi sumber belajar, fleksibilitas ruang-waktu, dan perluasan akses informasi. Analisis dilakukan dalam perspektif global dan nasional, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan kontekstual.
4. Menawarkan strategi konseptual bagi pemimpin pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi dengan prinsip humanisasi.
Tujuan akhir dari penelitian ini adalah merumuskan strategi kepemimpinan yang mampu mengelola transformasi digital secara bermakna. Strategi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa digitalisasi pendidikan tidak mengarah pada dehumanisasi, melainkan berfungsi sebagai sarana pemerdekaan, pemberdayaan, dan pemanusiaan peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi numerik, melainkan untuk menggali makna, memahami konteks, serta mendeskripsikan fenomena kepemimpinan humanis di tengah disrupsi teknologi pendidikan secara mendalam. Kajian literatur dianggap tepat karena isu yang dibahas bersifat konseptual, multidimensi, dan menuntut pemahaman komprehensif dari berbagai perspektif teoritis maupun empiris.

Sumber data penelitian diperoleh dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi buku-buku utama yang membahas teori kepemimpinan humanis, etika pendidikan, serta gagasan tentang disrupsi teknologi. Sementara itu, literatur sekunder mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga pendidikan global seperti UNESCO¹⁴, dan dokumen kebijakan resmi pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003¹⁵ tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemilihan literatur dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan memilih hanya sumber yang relevan dan kredibel sesuai fokus penelitian, khususnya yang mengulas: (1) disrupsi teknologi dalam pendidikan, (2) kepemimpinan humanis, dan (3) problem akademik seperti kesenjangan digital, menurunnya kualitas interaksi, serta dominasi orientasi teknokratis.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi tiga tahapan utama yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. **Reduksi data.** Pada tahap ini, peneliti menyeleksi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang ditemukan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap isu-isu utama, seperti ketimpangan kompetensi digital antara guru dan siswa, menurunnya kualitas interaksi interpersonal, kesenjangan akses terhadap teknologi, serta risiko orientasi teknokratis dalam pendidikan. Proses reduksi ini dilakukan secara sistematis untuk menjaga ketepatan fokus kajian sekaligus menghindari tumpang tindih informasi.

Tema Utama	Sub-Tema	Sumber/Referensi
------------	----------	------------------

¹⁴ UNESCO, *Education in a Digital World: Global Report* (Paris: UNESCO Publishing, 2021), hlm. 5.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

Disrupsi Teknologi dalam Pendidikan	- Pergeseran dari tatap muka ke daring, LMS, big data, AI. - Akses belajar semakin luas dan fleksibel. - Personalisasi pembelajaran.	Christensen (2016); Selwyn (2019)
Problem Akademik	1. Ketimpangan kompetensi digital guru dan siswa. 2. Menurunnya interaksi interpersonal guru-siswa. 3. Orientasi teknokratis yang menggeser fungsi humanisasi. 4. Kesenjangan digital (akses internet/perangkat).	Selwyn (2019); Zhao (2020); Freire (2005); Tilaar (2002)
Kepemimpinan Humanis	- Berlandaskan <i>ethics of care</i> : empati, kepedulian, penghormatan martabat manusia, komunikasi dialogis. - Fokus pada pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan.	Noddings (2013)
Penelitian Nasional	- Kepemimpinan humanis kepala sekolah mengurangi dampak negatif teknologi. - Meningkatkan motivasi belajar siswa dan memperkuat karakter.	Mutohar (2019); Arifin (2021)
Penelitian Global	- <i>Learning organization</i> : integrasi teknologi dengan pembelajaran bermakna. - Teknologi tetap berpusat pada nilai kemanusiaan.	Senge (2006)
Kebijakan Nasional	- Tujuan pendidikan nasional: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

2. **Penyajian data.** Setelah proses reduksi, literatur yang relevan disusun dalam bentuk tema-tema analisis. Tema yang diangkat mencakup: **Peluang Teknologi dalam Pendidikan** (Membuka akses belajar tanpa batas ruang dan waktu, Memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, Menyediakan media pembelajaran yang variatif dan inovatif bagi guru.) **Tantangan Dehumanisasi Pendidikan** (Menurunnya kualitas interaksi guru-siswa sehingga mengurangi aspek afektif dan pembentukan karakter, Resiko pendidikan bergeser ke arah teknokratis, hanya menekankan capaian kognitif, Kesenjangan digital menciptakan ketidakadilan akademik.) **Relevansi Kepemimpinan Humanis** (Memberi keseimbangan antara inovasi teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan, Menjadi instrumen pencegah dehumanisasi pendidikan melalui pendekatan empati, kepedulian, dan pembentukan karakter, Di Indonesia, sesuai dengan tujuan UU No. 20 Tahun 2003, kepemimpinan humanis memastikan pendidikan tidak hanya mencetak peserta didik cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan demokratis)
3. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi.** Pada tahap terakhir, dilakukan sintesis konseptual dengan merangkum temuan-temuan dari literatur yang telah dianalisis. Kesimpulan tidak hanya berupa pernyataan umum, tetapi juga penegasan strategi konseptual kepemimpinan humanis yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan, terutama aspek kepedulian sosial dan keadilan pendidikan. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antar-sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi.

Selain tiga tahap tersebut, penelitian ini juga menekankan orientasi kepedulian sosial dalam proses kajian. Hal ini berarti bahwa analisis literatur tidak hanya difokuskan pada aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosialnya, seperti pemerataan akses pendidikan, perlindungan martabat peserta didik, serta upaya menghindari diskriminasi akibat kesenjangan digital. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan tidak hanya memberi kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur tentang kepemimpinan humanis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi kepemimpinan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada pemanusiaan peserta didik di tengah derasnya arus transformasi digital.

HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah literatur yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena disrupsi teknologi dalam pendidikan memiliki dua wajah yang saling berlawanan. Di satu sisi, teknologi membawa peluang besar berupa perluasan akses informasi, fleksibilitas ruang dan waktu belajar, serta diversifikasi sumber belajar yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Namun, di sisi lain, teknologi juga menimbulkan problem akademik yang berpotensi mereduksi esensi pendidikan sebagai proses pemanusiaan.

No	Problem Akademik
1	<p>Ketimpangan Kompetensi Digital. Ketimpangan literasi digital antara guru dan siswa menjadi problem mendasar yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Sebagian guru belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk mengelola teknologi sebagai media pembelajaran, sementara sebagian siswa pun mengalami keterbatasan dalam mengakses perangkat maupun jaringan. Kondisi ini memperkuat jurang ketidakmerataan kualitas pembelajaran, khususnya di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang lemah. Temuan ini mengafirmasi pandangan Selwyn (2019) bahwa digital divide tidak hanya menyangkut akses, tetapi juga keterampilan dalam menggunakannya.</p> <p>Kepemimpinan humanis dalam konteks ini perlu menekankan strategi penguatan kapasitas digital yang bersifat partisipatif dan inklusif. Guru didorong untuk terus mengembangkan diri melalui pelatihan berkelanjutan, sementara siswa perlu dibekali keterampilan digital yang kritis, kreatif, dan etis. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, melainkan juga kesadaran moral dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.</p>
2	<p>Penurunan Interaksi Interpersonal. Hasil kajian menunjukkan bahwa interaksi interpersonal mengalami penurunan signifikan akibat pergeseran pembelajaran dari ruang tatap muka ke ruang digital. Interaksi yang sebelumnya sarat dengan nilai emosional dan relasi personal kini berkurang intensitasnya, sehingga berpotensi melemahkan proses pembentukan karakter. Zhao (2020) menekankan bahwa relasi interpersonal dalam pendidikan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi, karena pendidikan pada hakikatnya adalah proses membangun manusia melalui nilai, empati, dan kepedulian.</p> <p>Kepemimpinan humanis dalam konteks ini berfungsi sebagai penyeimbang. Pemimpin pendidikan perlu mendorong penerapan model blended learning yang mengkombinasikan keunggulan teknologi dengan interaksi tatap muka. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran berbasis dialog, kolaborasi, dan refleksi perlu dioptimalkan untuk menjaga kualitas komunikasi yang humanis. Dengan demikian, meskipun teknologi menjadi medium utama, esensi relasi kemanusiaan tetap dapat terpelihara.</p>
3	<p>Orientasi Tekokratis. Penelitian ini juga menemukan kecenderungan munculnya orientasi teknokratis dalam pendidikan, di mana capaian pembelajaran lebih ditekankan pada dimensi kognitif dan keterampilan teknis. Hal ini sejalan dengan kritik Freire (2005) yang menolak model pendidikan “banking” yang memposisikan peserta didik sebagai objek pasif. Jika dibiarkan, pendidikan akan kehilangan ruh humanisnya dan hanya menghasilkan individu yang terampil secara teknis tetapi miskin secara moral dan sosial.</p> <p>Kepemimpinan humanis hadir sebagai antitesis dari orientasi teknokratis. Pemimpin perlu memastikan bahwa teknologi ditempatkan sebagai sarana, bukan tujuan utama pendidikan. Biesta (2010) mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang qualification, tetapi juga socialization dan subjectification. Dengan pendekatan pedagogi kritis, peserta didik diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu berpikir reflektif, kritis, dan berdaya menghadapi perubahan.</p>
4	<p>Kesenjangan Digital. Persoalan kesenjangan digital menjadi tantangan global sekaligus lokal yang tidak bisa diabaikan. Keterbatasan akses terhadap perangkat digital dan konektivitas internet menimbulkan ketidakadilan akademik, terutama bagi siswa di daerah tertinggal atau keluarga kurang mampu (Tilaar, 2002). Temuan ini sejalan dengan Warschauer (2004) yang menegaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya berupa akses fisik, tetapi juga mencakup kualitas pemanfaatan teknologi.</p> <p>Kepemimpinan humanis perlu mendorong kebijakan afirmatif yang berorientasi pada pemerataan. Subsidi perangkat, penyediaan jaringan internet, dan pemanfaatan teknologi alternatif (radio, televisi pendidikan, serta platform offline) dapat menjadi solusi jangka pendek sekaligus jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan dapat bergerak menuju keadilan sosial yang lebih merata.</p>

Solusi Menghadapi Problem Akademik dalam Disrupsi Teknologi Pendidikan

Fenomena disrupsi teknologi telah membawa ambivalensi dalam dunia pendidikan. Agar pendidikan tetap berfungsi sebagai proses pemanusiaan, diperlukan strategi kepemimpinan humanis yang mampu menjembatani peluang dan tantangan teknologi. Solusi berikut ditawarkan untuk mengatasi problem akademik yang telah diidentifikasi:

1. Mengatasi ketimpangan kompetensi digital

- Pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dalam literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pembelajaran.
 - Pengembangan kurikulum literasi digital untuk peserta didik agar mereka memiliki keterampilan kritis, etis, dan kreatif dalam menggunakan teknologi.
 - Kolaborasi lintas sektor (pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat) untuk memperkuat kapasitas digital melalui workshop, pelatihan daring, maupun platform berbagi pengetahuan
 - Pelatihan literasi digital berkelanjutan bagi guru sangat diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut UNESCO (2018), peningkatan kapasitas digital guru menjadi kunci transformasi pendidikan yang inklusif, karena guru adalah mediator utama antara teknologi dan peserta didik. Bagi siswa, integrasi kurikulum literasi digital sejak dini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan etis dalam menggunakan teknologi (Voogt & Roblin, 2012).
2. **Memperkuat interaksi interpersonal dalam ruang digital**
- Mendorong blended learning dengan tetap menyediakan ruang interaksi tatap muka agar aspek emosional, karakter, dan nilai dapat dibangun.
 - Mendesain interaksi digital yang humanis dengan penggunaan metode pembelajaran berbasis dialog, diskusi kelompok, dan refleksi, sehingga komunikasi guru-siswa tidak hanya bersifat instruksional.
 - Mengintegrasikan nilai empati dan kepedulian sosial dalam pembelajaran daring melalui aktivitas kolaboratif, proyek sosial, atau simulasi kehidupan nyata.
 - Pendidikan berbasis teknologi tetap perlu mempertahankan ruang interaksi tatap muka. Garrison, Anderson, & Archer (2000) melalui model *Community of Inquiry* menegaskan bahwa kehadiran sosial (social presence) merupakan elemen penting untuk membangun hubungan emosional dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu, blended learning yang mengombinasikan pembelajaran digital dengan interaksi langsung dapat menjadi solusi menjaga kualitas relasi guru-siswa (Garrison & Vaughan, 2008).
3. **Mencegah orientasi teknokratis dalam pendidikan**
- Menguatkan visi pendidikan humanis yang menempatkan teknologi sebagai sarana, bukan tujuan utama pembelajaran.
 - Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran agar dimensi afektif dan moral tidak terabaikan.
 - Mengadopsi pendekatan pedagogi kritis ala Freire, yang menekankan peserta didik sebagai subjek aktif yang mampu berpikir reflektif, kritis, dan berdaya dalam menghadapi perubahan.
 - Teknologi harus diposisikan sebagai sarana, bukan tujuan pendidikan. Biesta (2010) menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada *qualification* (pengetahuan dan keterampilan), tetapi juga harus memperhatikan *socialization* dan *subjectification*, yaitu pembentukan karakter dan identitas manusiawi peserta didik. Dengan mengadopsi pendekatan pedagogi kritis, guru dapat mengarahkan teknologi untuk memperkuat kemampuan reflektif, kritis, dan etis siswa, bukan sekadar menambah keterampilan teknis.
4. **Mengurangi kesenjangan digital**
- Penyediaan fasilitas TIK secara merata, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, melalui program subsidi perangkat dan jaringan internet.
 - Kebijakan afirmatif bagi siswa dari keluarga kurang mampu berupa bantuan kuota internet, beasiswa perangkat, atau akses ke pusat belajar komunitas.
 - Pemanfaatan teknologi alternatif seperti radio, televisi pendidikan, dan platform pembelajaran offline yang tetap dapat menjangkau daerah dengan keterbatasan infrastruktur.
 - Pemerataan akses teknologi menjadi isu fundamental. Warschauer (2004) menyatakan bahwa kesenjangan digital bukan hanya soal akses perangkat, tetapi juga soal kualitas pemanfaatannya. Oleh karena itu, pemerintah dan sekolah perlu memastikan adanya kebijakan afirmatif berupa subsidi perangkat, penyediaan infrastruktur internet, serta pengembangan pusat belajar komunitas. Selain itu, pemanfaatan media alternatif seperti televisi pendidikan dan radio masih relevan untuk menjangkau daerah dengan keterbatasan infrastruktur (Trucano, 2005).

Dengan strategi tersebut, kepemimpinan humanis berfungsi sebagai paradigma yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga berorientasi pada nilai, empati, dan keadilan sosial. Hal ini penting agar pendidikan tidak terjebak dalam dehumanisasi, melainkan mampu menumbuhkan generasi yang cakap digital sekaligus berkarakter sesuai nilai Pancasila.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa disrupsi teknologi dalam pendidikan membawa ambivalensi: menghadirkan peluang inovatif sekaligus menimbulkan tantangan dehumanisasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Christensen (2016) bahwa disrupsi selalu melahirkan sistem baru yang menggantikan sistem lama, tetapi konsekuensinya tidak

selalu linear. Dalam pendidikan, transformasi digital mampu memperluas akses, meningkatkan fleksibilitas, dan mempercepat alur informasi, namun tetap menyisakan problem mendasar yang perlu diantisipasi melalui pendekatan kepemimpinan yang tepat.

Salah satu problem akademik yang menonjol adalah ketimpangan kompetensi digital antara guru dan peserta didik. Ketidakterataan literasi digital ini menyebabkan kesenjangan kualitas pembelajaran, terutama dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi disparitas infrastruktur pendidikan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini akan memperlebar jurang ketidakadilan akademik. Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan perlu berorientasi pada pengembangan kapasitas digital secara merata, baik melalui program peningkatan kompetensi guru maupun fasilitasi akses teknologi yang inklusif bagi siswa.

Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan menurunnya interaksi interpersonal dalam proses pendidikan digital. Padahal, interaksi personal antara guru dan siswa bukan hanya sarana transfer pengetahuan, melainkan juga media internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan pembangunan relasi emosional. Noddings (2013) melalui teori *ethics of care* menekankan bahwa kepedulian dan empati dalam relasi interpersonal merupakan esensi dari pendidikan humanis. Dengan demikian, kepemimpinan humanis berperan penting dalam memastikan bahwa meskipun pembelajaran dimediasi teknologi, ruang-ruang interaksi bermakna tetap dipertahankan.

Temuan berikutnya adalah kecenderungan orientasi teknokratis dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang berlebihan berisiko mereduksi fungsi pendidikan menjadi sekadar instrumen kognitif, mengabaikan aspek afektif dan humanisasi. Hal ini sejalan dengan kritik Freire (2005) terhadap pendidikan yang cenderung memposisikan peserta didik sebagai objek, bukan subjek aktif. Kepemimpinan humanis dengan basis nilai, moral, dan kepedulian sosial dapat menjadi antitesis dari orientasi teknokratis tersebut, dengan cara mengarahkan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat dimensi kemanusiaan.

Selanjutnya, persoalan kesenjangan digital menegaskan bahwa transformasi teknologi tidak selalu bersifat inklusif. Tilaar (2002) telah menyoroti bahwa ketidakadilan akses akan melahirkan diskriminasi akademik yang semakin memperlebar ketidaksetaraan sosial. Dalam hal ini, kepemimpinan humanis tidak hanya berfokus pada level sekolah, tetapi juga harus mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak pada kelompok marjinal. Dengan demikian, kepemimpinan humanis memiliki relevansi sosial yang kuat dalam membangun keadilan pendidikan.

Konteks Indonesia memberikan legitimasi normatif bagi pentingnya kepemimpinan humanis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan manusia beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Dengan dasar ini, kepemimpinan humanis dapat diposisikan sebagai paradigma kepemimpinan yang sejalan dengan nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan humanis bukan sekadar respons adaptif terhadap teknologi, melainkan juga merupakan tuntutan konstitusional dan ideologis dalam sistem pendidikan Indonesia.

Secara global, Senge (2006) melalui kerangka *learning organization* menegaskan pentingnya pemimpin dalam mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran yang bermakna. Hal ini menggarisbawahi bahwa kepemimpinan humanis bukan hanya isu lokal, melainkan juga kebutuhan universal dalam menghadapi transformasi digital. Relevansi global ini menunjukkan bahwa nilai-nilai humanis bersifat lintas batas, dapat diterapkan pada berbagai konteks budaya, dan menjadi fondasi dalam menjaga arah pendidikan agar tetap berpihak pada manusia.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kepemimpinan humanis tidak hanya berfungsi sebagai strategi manajerial, tetapi juga sebagai paradigma filosofis yang mampu menyeimbangkan antara inovasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemimpin pendidikan yang berlandaskan humanisme memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa teknologi tidak menjadi instrumen dehumanisasi, melainkan justru menjadi sarana untuk memerdekakan, memanusiakan, dan menumbuhkan kepedulian sosial pada peserta didik.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa disrupsi teknologi telah menghadirkan ambivalensi dalam pendidikan: di satu sisi memberikan peluang besar berupa perluasan akses informasi, fleksibilitas, dan efisiensi pembelajaran, tetapi di sisi lain menimbulkan problem akademik berupa ketimpangan literasi digital, penurunan interaksi interpersonal, kecenderungan orientasi teknokratis, serta kesenjangan digital. Problem ini berpotensi mereduksi esensi pendidikan sebagai proses pemanusiaan apabila tidak direspons dengan pendekatan yang tepat.

Kepemimpinan humanis terbukti memiliki relevansi strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan menekankan nilai empati, penghargaan terhadap martabat manusia, komunikasi dialogis, dan pembentukan karakter, kepemimpinan humanis mampu menyeimbangkan inovasi digital dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Pancasila, sehingga berfungsi tidak hanya sebagai strategi manajerial, tetapi juga sebagai tuntutan ideologis dan normatif.

Dengan demikian, kepemimpinan humanis menjadi fondasi penting agar transformasi digital dalam pendidikan tidak terjebak pada dehumanisasi, melainkan menjadi sarana untuk memerdekakan, memanusiakan, dan menumbuhkan kepedulian sosial pada peserta didik. Keberhasilan pendidikan di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menguasai teknologi, tetapi juga oleh kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan inovasi dengan humanisasi.

Adapun implikasi praktis dari kajian ini dapat dijadikan acuan bagi berbagai pemangku kepentingan:

1. **Bagi pendidik**, penting untuk meningkatkan literasi digital yang terintegrasi dengan pendekatan humanis agar teknologi tidak mengurangi kualitas interaksi personal dengan siswa.
2. **Bagi peserta didik**, strategi humanis dalam pembelajaran digital membantu mereka mengembangkan keterampilan teknologi sekaligus karakter kritis, empatik, dan bertanggung jawab sosial.
3. **Bagi lembaga pendidikan**, perlu kebijakan yang menyeimbangkan investasi teknologi dengan penguatan kurikulum berbasis karakter, ruang refleksi, dan aktivitas kolaboratif.
4. **Bagi pemerintah**, urgensi kebijakan afirmatif diperlukan untuk mengurangi kesenjangan digital melalui penyediaan sarana prasarana, subsidi internet, dan dukungan bagi sekolah di daerah tertinggal.
5. **Bagi masyarakat luas**, keterlibatan aktif orang tua dan komunitas sangat penting agar nilai-nilai sosial, budaya, dan moral tetap terjaga di tengah arus teknokratisasi pendidikan.

Dengan demikian, implikasi praktis dari kajian ini tidak hanya menekankan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga penguatan dimensi kemanusiaan sebagai ruh utama pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). *Kepemimpinan humanis kepala sekolah di era digital*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(2), 123–134.
- Biesta, G. (2010). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Routledge.
- Christensen, C. M. (2016). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Harvard Business Review Press.
- Freire, P. (2005). *Pendidikan kaum tertindas* (terj. Utomo Dananjaya). LP3ES. (Karya asli diterbitkan 1970).
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2–3), 87–105.
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines*. Jossey-Bass.
- Mutohar, P. M. (2019). *Manajemen pendidikan Islam di era digital: Kepemimpinan kepala sekolah berbasis nilai humanis*. Jurnal Kependidikan Islam, 13(1), 45–60.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education* (2nd ed.). University of California Press.
- Selwyn, N. (2019). *Should robots replace teachers? AI and the future of education*. Polity Press.
- Senge, P. M. (2006). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization* (Rev. ed.). Doubleday.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Grasindo.

- Trucano, M. (2005). *Knowledge maps: ICT in education*. infoDev/World Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- UNESCO. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2*. UNESCO Institute for Statistics.
- Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. *Journal of Curriculum Studies*, 44(3), 299–321.
- Warschauer, M. (2004). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. MIT Press
- Zhao, Y. (2020). *An education crisis is a terrible thing to waste: How radical changes can spark student excitement and success*. Teachers College Press.